

**JURNAL**

**ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN LAUT DARI  
KEGIATAN KAPAL PERIKANAN DI JUWANA KABUPATEN PATI  
PROVINSI JAWA TENGAH**



**Diajukan oleh :**

**CITRA SEFTIA MARDIANTARI**

**NPM : 130511210**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan  
Hidup**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2017**

Halaman Pengesahan Jurnal

**ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN LAUT DARI KEGIATAN  
KAPAL PERIKANAN DI JUWANA KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA  
TENGAH**



**Diajukan oleh :**

**Citra Seftia Mardiantari**

**NPM : 130511210**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan  
Hidup**

**Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing**

**Dosen Pembimbing I**

**Tanggal**

**.11 April 2017**

**Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.**

**Tanda Tangan : .....**

**Mengetahui**

**Dekan,**



**FAKULTAS  
HUKUM**

**Endro Susilo, S.H., LL.M**

# **ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN LAUT DARI KEGIATAN KAPAL PERIKANAN DI JUWANA KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA TENGAH**

**Citra seftia mardiantari**  
Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta  
Email : [15scicit@gmail.com](mailto:15scicit@gmail.com)

## ***Abstract***

*Fishing vessels activities in the sea cause positive and negative impacts. One of the negative impacts is marine pollution. We need efforts to protect the marine in Juwana and regulate fishing activities to protect marine environment for the future. Based on that reason, the writer wrote a thesis entitle LEGAL ASPECTS OF MARINE ENVIRONMENT PROTECTION FROM FISHING VESSELS ACTIVITIES IN JUWANA PATI DISTRICT CENTRAL JAVA PROVINCE. The purpose of this research was to provide marine environment protection from the fishing vessels in Juwana. This research used empirical method. The thinking process in this research with the withdrawal of conclusion was inductive method. It started with two particular concepts until the conclusion was the principle of common. There was marine environment protection rules to avoid and cope with the pollution in Juwana but it has not implemented well. So, the role of the government and the community was important to protect marine environment. Moreover, we should have awareness of not throwing any waste into marine environment especially in Juwana Pati District Central Java Province.*

***Keyword: fishing vessels, pollution , marine environment protection in Juwana***

## **1. PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara maritim, karena Indonesia memiliki luas wilayah perairan atau laut lebih luas dari pada daratannya, sehingga masyarakat Indonesia sebagian besar ada yang menjadi nelayan. Laut sendiri adalah salah satu sumber daya alam yang memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia, digunakan untuk tempat wisata laut, sebagai jalur perjalanan maupun penyeberangan laut, untuk

pengiriman barang dengan kapal barang dan kegiatan penangkapan ikan (sebagai mata pencaharian para nelayan). Kegiatan-kegiatan di laut tersebut, dapat menimbulkan dampak positif yaitu dapat mendorong pertumbuhan perekonomian melalui peluang investasi, peluang kerja, peluang usaha, meningkatkan penerimaan devisa negara, meningkatkan produktivitas dan pada

akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup>

Selain dampak positif, dalam kegiatan – kegiatan yang dilakukan di laut tersebut juga menimbulkan dampak negatif yang berupa pencemaran laut dari limbah plastik yang berasal dari sampah-sampah rumah tangga di perkotaan, kegiatan perminyakan seperti bocornya pipa minyak, oli yang di buang oleh kapal-kapal besar baik sengaja maupun tidak sengaja, penangkapan ikan dengan cara pengeboman dan trawl (pukat) serta jutaan mesin kendaraan bermotor yang menjatuhkan sejumlah kecil minyak setiap hari ke jalan dan tempat parkir.<sup>2</sup> Meskipun terjadi di darat, kegiatan tersebut dapat mempengaruhi laut, jika limbah dari darat jatuh atau mengalir ke laut.

Akibat dari pencemaran laut itu dapat menimbulkan bencana bagi semua kehidupan laut termasuk terumbu karang, tumbuhan laut, dan ikan. Walaupun manusia tidak secara langsung dipengaruhi oleh pencemaran air laut, kehidupan laut merupakan sumber makanan bagi manusia.<sup>3</sup> Apabila air laut tercemar, maka banyak ikan yang terkena racun, sehingga kualitas ikan menurun dan banyak ikan yang mati. Sehingga mengakibatkan penurunan

hasil penangkapan ikan oleh nelayan di laut.

Permasalahan pencemaran lingkungan laut ini sangat penting, karena mempengaruhi perekonomian para nelayan di laut. Selain untuk mencegah pencemaran, perlindungan laut juga mencakup persoalan-persoalan seperti pengambilan ikan yang berlebihan *over fishing*, cara-cara penangkapan ikan yang merusak, perusakan habitat, pelestarian jenis-jenis kekayaan hayati yang terancam kemusnahan.<sup>4</sup> Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya perlindungan lingkungan laut untuk mengendalikan, bahkan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan laut terutama pencemaran yang ditimbulkan oleh kegiatan kapal perikanan.

## 2. METODE

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan/berfokus pada fakta empiris atau fakta sosial sebagai data utama yang diperoleh langsung di lokasi penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum yang digunakan sebagai penunjang.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pelabuhan Bajomulyo Juwana Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara, studi kepustakaan, kuisioner dan observasi. Responden penelitian ini adalah Bapak Ernowo dan Bapak Haryanto selaku pemilik kapal di Juwana, sedangkan

---

<sup>1</sup> Ade Masya Resa, Dampak pembangunan pariwisata terhadap lingkungan, [studioriau.com/artikel/lingkungan/dampak-pembangunan-pariwisata.html](http://studioriau.com/artikel/lingkungan/dampak-pembangunan-pariwisata.html), tanggal 15 September 2016, 22.52 WIB

<sup>2</sup> Lingkungan hidup bumi kita, [www.lingkunganhidup.co/pencemaran-laut-di-indonesia-dan-dampaknya/](http://www.lingkunganhidup.co/pencemaran-laut-di-indonesia-dan-dampaknya/), 9 oktober 2016, 20.05 WIB

<sup>3</sup> Penyebab pencemaran laut, <https://www.wedaran.com/19575/penyebab-pencemaran-laut/>, 9 Oktober 2016, 20.23 WIB.

---

<sup>4</sup> Mochtar Kusuma Atmaja, 1992, *Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut*, Penerbit Sinar Grafika dan Pusat Studi Wawasan Nusantara, Jakarta, hlm.8

wawancara dilakukan dengan Bapak Suharto selaku bagian pengawasan dan pengendalian sumber daya alam (SDA) dinas perikanan dan kelautan kabupaten pati, Bapak Edy Budiyo selaku petugas tata usaha pelabuhan Bajomulyo di Juwana, dan Bapak Jamari selaku kepala paguyuban perikanan di Juwana.

Analisis data dilakukan dengan membaca, mengklarifikasi, dan menafsirkan sehingga mendapatkan gambaran akan masalah yang diteliti. Proses berpikir yang digunakan secara deduktif yaitu berawal dari hal yang umum ke yang khusus, yang berarti ketentuan peraturan perundang-undangan untuk ditarik kesimpulan mengenai perlindungan lingkungan laut dari kegiatan kapal perikanan di Juwana.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran umum pelabuhan di kecamatan Juwana

Kecamatan Juwana adalah salah satu kecamatan dari Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. Kota ini juga dilalui oleh sungai juwana (disebut juga sungai silugonggo) yang menjadi daerah aliran sungai waduk kedungombo. Sungai terbesar di Kabupaten Pati ini tiap tahun mengakibatkan banjir termasuk di kota Juwana. Luas wilayah/daerah kecamatan Juwana adalah 5.407,50 Ha.<sup>5</sup>

Kecamatan Juwana mempunyai Pelabuhan perikanan yang bernama Bajomulyo yang terletak di desa Bajomulyo, kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Letak geografis PPP Bajomulyo terletak di desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Akses jalan 90 km dari ibu kota provinsi, 14 km

dari ibu kota kabupaten, 1 km dari ibu kota kecamatan. PPP Bajomulyo secara geografis terletak antara 111°8'30" BT dan 6°42'30" LS di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati dengan panjang pantai 60,0 Km serta berada di sisi Barat sungai Juana sepanjang 1.346 m dengan luas lahan ±15Ha.<sup>6</sup>

Kegiatan dan pelayanan yang dilakukan di kawasan pelabuhan perikanan pantai Bajomulyo antara lain:

1. Fasilitas pemeriksaan cek fisik kapal perikanan
2. Fasilitas perijinan usaha perikanan (kapal 10-30 GT)
3. Pembinaan nelayan dan bakul ikan
4. Penyuluhan kebersihan, ketertiban dan keamanan serta pengendalian sumberdaya ikan
5. Penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB) oleh syahbandar perikanan
6. Penyediaan data bagi pusat informasi pelabuhan perikanan- PPP Bojomulyo
7. Pelayanan nelayan andon
8. Penerbitan SKPI (Surat Keterangan Pendaratan Ikan)<sup>7</sup>

#### B. Kapal Perikanan

Menurut Setianto (2007), beberapa jenis kapal perikanan antara lain :

1. Kapal *Purse seine* kapal yang secara khusus dirancang untuk

<sup>5</sup> Data dari kunjungan ke Kecamatan Juwana, tanggal 9 Maret 2017, pukul 11.00 WIB

<sup>6</sup> <http://dkp.jatengprov.go.id/home/a/ppp-bajomulyo>, diakses 5 februari 2017, Pukul 10.00 WIB

<sup>7</sup> Wawancara dengan bapak Edy Budiyo selaku pengurus di pelabuhan pada tanggal 21 November 2016

digunakan menangkap ikan dengan alat tangkap jenis *purse seine* atau sering juga disebut pukat cincin, kapal ini sekaligus digunakan untuk menyimpan, mendinginkan dan mengangkut hasil.

2. Kapal Longline  
kapal secara khusus dirancang untuk menangkap ikan dengan alat tangkap jenis *long line* atau sering juga disebut rawai dan sekaligus untuk menyimpan, mendinginkan, dan mengangkut hasil tangkapan sampai ke pelabuhan. Kapal longline yang berukuran 30-100 GT pada umumnya dioperasikan untuk menangkap ikan jenis tuna dengan hasil sampingan ikan cucut, sehingga sering pula kapal tersebut disebut kapal tuna *long line*.
3. Kapal *Trawl*  
adalah kapal yang secara khusus dirancang dan dibangun untuk menangkap ikan dengan alat tangkap jenis *Trawl* atau sering disebut juga pukat harimau. Tujuan utama penangkapan adalah udang dengan hasil sampingan ikan demersal, sehingga sering disebut juga pukat udang.
4. Kapal *pole and liner*  
kapal yang dibangun secara khusus digunakan untuk menangkap ikan

dengan alat penangkapan jenis *pole and line* atau sering disebut juga Tujuan utama penangkapan ikan dari kapal *pole and line* yang berukuran 30-100 GT adalah jenis cakalang (*skipjack*), dan ikan tuna jenis *yellow fin tuna*, sehingga sering pula kapal disebut sebagai kapal *skipjack pole and line*.<sup>8</sup>

Hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, kapal-kapal yang berlabuh atau bersandar di pelabuhan Bajomulyo di Juwana adalah kapal porsen dan kapal longline di TPI 1( Tempat Pelelangan ikan), dan kapal trawl dan kapal Pole and liner di TPI 2. Pencemaran lingkungan laut terjadi akibat adanya sampah maupun limbah yang berasal dari darat seperti limbah rumah tangga sekitar pelabuhan, pembuangan limbah industri, serta pembuangan oli dari kendaraan bermotor setiap harinya yang jatuh ke dalam lingkungan laut.

Tidak hanya itu saja, pencemaran ada yang berasal dari kapal perikanan yang terjadi akibat dari tumpahnya atau dikeluarkannya bahan yang disengaja atau tidak sengaja berupa minyak, bahan cair beracun, muatan berbahaya dalam kemasan, kotoran, limbah pencucian ikan hasil tangkapan, sampah plastik bungkus ikan, dan udara dari kapal. Maka dari itu diperlukan adanya

---

<sup>8</sup> Syaifudin, pengantar kapal perikanan, <http://syaifudin.com/pengantar-kapal-perikanan/>, diakses 29 November 2016, 13.07 WIB

perlindungan laut dari kegiatan-kegiatan manusia yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan laut terutama untuk kegiatan kapal perikanan.

### C. perlindungan lingkungan laut

Dalam pasal 1 butir 10 undang – undang 32 tahun 2014 tentang kelautan yang dimaksud dengan perlindungan lingkungan laut adalah Upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan sumber daya kelautan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di laut yang meliputi konservasi laut, pengendalian pencemaran laut, penanggulangan bencana kelautan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta kerusakan dan bencana.

Arti pentingnya perlindungan lingkungan laut Indonesia mencakup kondisi lingkungan laut, pengaturan terhadap lingkungan laut, dan upaya penegakan hukum pada kasus pencemaran lingkungan laut. Perlindungan lingkungan laut merupakan upaya perlindungan atas sumber kekayaan alam, sumber kekayaan alam ini terdapat di wilayah Indonesia.<sup>9</sup>

unsur – unsur atau syarat mutlak untuk disebut suatu lingkungan (laut) telah tercemar harus memenuhi unsur – unsur sebagai berikut :

- a) Masuk atau dimasukkannya komponen – komponen (makhluk

hidup, zat, energi, dan lain-lain)

- b) Ke dalam lingkungan atau ekosistem lingkungan

- c) Kegiatan manusia

- d) Timbul perubahan, atau menurunkan mutu yang lebih rendah

hingga ke tingkat tertentu

- e) Fungsi lingkungan menjadi berkurang atau tidak dapat berfungsi

Menurut peruntukannya.<sup>10</sup>

Dari unsur – unsur pencemaran di atas, apabila salah satu dari unsur – unsur dimaksud tidak terpenuhi maka perbuatan demikian tidaklah dikategorikan sebagai pencemaran lingkungan.

Menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan lingkungan maritim, pelaksanaan dan/atau penyelenggaraan perlindungan lingkungan maritim dapat dilakukan melalui dua cara yaitu dengan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pengoperasian kapal dan dari kegiatan pelabuhan.

Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pengoperasian kapal dilakukan secara cepat, tepat dan terpadu serta terkoordinasi untuk mengendalikan, mengurangi dan membersihkan tumpahan minyak atau bahan cair beracun dari kapal maupun pelabuhan ke perairan untuk meminimalisir pencemaran maupun kerusakan laut. Sedangkan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari kegiatan kepelabuhanan yaitu dengan cara:

- a. Menyediakan dan memelihara penahan

---

<sup>9</sup> Koesnadi hardjasoemantri, 2001, *Hukum Dan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, cetakan 1, penerbit Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, jakarta, hlm 258.

---

<sup>10</sup> N.H.T Siahaan, *Op.Cit.*, hlm 286.

- gelombang, kolam pelabuhan, dan alur pelayaran
- b. Menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi pelayaran
- c. Menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan
- d. Menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan
- e. Menyusun rencana induk pelabuhan serta daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan
- f. Menjamin kelancaran arus barang
- g. Menyediakan fasilitas pelabuhan

#### **D. Perlindungan lingkungan laut di Juwana**

Perlindungan Hukum yang berlaku di Juwana adalah dengan adanya pemberlakuan undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup, undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, dan peraturan daerah. Perlindungan hukum di Juwana terhadap lingkungan laut tidak hanya dengan Peraturan Perundang-Undangan saja, tetapi dengan adanya lembaga-lembaga pendukung seperti adanya peran Dinas Perikanan dan Kelautan yang memiliki tugas dan wewenang yaitu:

1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dan membantu kelangsungan pembangunan nasional melalui potensi dan sumber daya alam yang ada di laut dan ikan.

2. Menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan serta sumber daya ikan.
3. Pembinaan dan fasilitasi bidang kelautan dan perikanan lingkup kabupaten/kota.
4. Pelaksanaan tugas di bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, perikanan tangkap, perikanan budidaya dan usaha kelautan dan perikanan.
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kelautan dan perikanan bagi kapal perikanan di bawah 5 GT.

Selain tugas dan wewenang itu, dinas perikanan dan kelautan juga memberi himbauan pada nelayan dan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan di sungai. Di sini dinas perikanan dan kelautan lebih ke urusan administrasinya.<sup>11</sup>

Dinas perikanan dan kelautan juga memiliki kewenangan mengatur kapal perikanan dibawah 5 GT (Gross Ton) kapal-kapal kecil. memberikan bantuan sosial dan paceklik pada nelayan yang diambilkan dari 1% pendapatan retribusi. Paceklik itu berupa bantuan bangunan setiap tahun kepada semua nelayan yang jumlahnya ada ±7.100 yang terkena paceklik, bantuan kemandirian nelayan di darat, di laut, kemudian apabila sakit.<sup>12</sup>

Upaya perlindungan lingkungan laut di Juwana tidak hanya dilakukan oleh dinas perikanan dan kelautan saja,

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Suharto dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pati pada tanggal 21 November 2016

<sup>12</sup> *ibid*



melainkan dilakukan pula oleh pihak pelabuhan. Dalam Pasal 41a Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perikanan pelabuhan memiliki fungsi pemerintahan dan pengusahaan guna mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari produksi sampai dengan pemasaran. Selain itu, upaya yang dilakukan oleh pihak pelabuhan adalah memberikan penyuluhan, dan pengetahuan bagi para nelayan mengenai pentingnya lingkungan laut bagi yang bermata pencaharian sebagai nelayan, cara menanggulangi pencemaran laut saat berlayar, yang salah satunya agar tidak membuang oli bekas kapal ke laut dan bagi kapal yang berukuran besar diwajibkan untuk memiliki alat pemisah minyak *WS OIL WATER SPERATOIR* yang digunakan agar tidak terjadi pencemaran minyak besar – besaran. Selain itu pihak pelabuhan juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan bongkar muat ikan, dan pembuangan limbah oli kapal yang harus di tampung dulu.<sup>13</sup> Dari pengamatan yang telah dilakukan, pelabuhan berfungsi sebagai tempat berlabuhnya kapal perikanan di pelabuhan juwana, bongkar muatan ikan, pemasaran dan kontribusi ikan, dan pengumpulan data tangkapan dan hasil ikan di TPI ( Tempat Pelelangan Ikan).

#### **E. Pengaturan perlindungan lingkungan laut untuk masa yang akan datang**

Pengaturan kegiatan perikanan memberikan perlindungan terhadap lingkungan laut seperti adanya Undang – undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi salah satu tugas dan wewenang dari pemerintah dan pemerintah daerah yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara.

Peraturan – peraturan lain untuk melindungi lingkungan laut di masa depan yaitu dengan adanya Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perikanan yang mengatur mengenai kegiatan yang ada di kapal dan di pelabuhan serta penegakan hukumnya bagi para pelanggar peraturan ini. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut juga memberi perlindungan laut, dalam Pasal 5 disebutkan bahwa bentuk perlindungan mutu laut yang dilakukan dengan berdasarkan inventarisasi dan/atau penelitian data mutu air laut, serta kondisi tingkat kerusakan laut yang mempengaruhi mutu laut itu sendiri. Dalam Pasal 13 juga diatur mengenai pencegahan perusakan laut dan dalam Pasal 15 diatur mengenai penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan laut. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim dengan adanya upaya mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan perairan yang bersumber dari kegiatan yang terkait dengan pelayaran. Serta terdapat Peraturan Menteri Nomor 29 tahun 2014 tentang Pencegahan

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan bapak Edy Budiyo selaku pengurus di pelabuhan pada tanggal 21 November 2016

Pencemaran Lingkungan Maritim dalam Pasal 2 mengenai penyelenggaraan perlindungan lingkungan maritim dilakukan dengan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pengoperasian kapal, kegiatan pelabuhan, kegiatan pencucian tangki kapal, (*tank cleaning*), pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan kapal, penutuhan kapal (*ship recycling*), serta pembuangan limbah di perairan (*dumping*).

Pengaturan yang ada sudah dapat mengurangi pencemaran, hanya saja harapan untuk kedepannya ada penegakan hukum yang tegas untuk menindak orang – orang yang melakukan perbuatan pencemaran laut. Agar para pelaku jera dalam melakukan pencemaran laut yang merugikan bagi pihak lain. Penegakan hukum yang tegas disini berupa sanksi maupun denda yang membuat para pelakunya jera untuk melakukan kegiatan pencemaran lingkungan laut di Juwana. Selain itu Pemerintah dapat membantu masyarakat dalam upaya pencegahan pencemaran. Bukan hanya saja apabila ada laporan maupun tertangkap tangan melakukan perbuatan pencemaran laut. Melainkan menanggulangnya sedini mungkin.<sup>14</sup> Dengan penyuluhan, pengawasan dan praktik secara riil mengenai penanggulangan maupun pengendalian pencemaran lingkungan laut yang telah terjadi.

#### 4. KESIMPULAN

Perlindungan Lingkungan laut di Juwana Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah sudah sesuai dengan undang- undang maupun peraturan yang berlaku, hanya saja pada

pelaksanaannya belum dilaksanakan dengan baik. Terlihat dari pemberian sanksi kepada oknum-oknum/pelaku yang melakukan pencemaran lingkungan laut dengan cara membuang sampah maupun limbah ke lingkungan laut, tidak ditindak secara tegas. Sehingga membuat para pelaku tidak jera dan tidak ada perubahan yang positif terhadap lingkungan laut.

Pengaturan kegiatan perikanan untuk melindungi lingkungan laut kedepannya pemerintah dapat membantu masyarakat dalam upaya pencegahan pencemaran. Serta adanya kesadaran masyarakatnya mengenai pentingnya menjaga kebersihan dari lingkungan khususnya di Juwana serta kesadaran dari pemilik kapal maupun penanggung jawab kapal mengenai pengolahan limbah selama melaut untuk tidak dibuang ke laut serta pelaksanaan dari peraturan-peraturan yang ada.

#### 5. REFRENSI

Mochtar Kusuma Atmaja, 1992, *Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut*, Penerbit Sinar Grafika dan Pusat Studi Wawasan Nusantara, Jakarta, hlm.8

Koesnadi hardjasoemantri, 2001, *Hukum Dan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, cetakan 1, penerbit Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, jakarta, hlm 258.

Ade Masya Resa , *Dampak pembangunan pariwisata terhadap lingkungan*, studioriau.com/artikel/lingkungan/dampak-pembangunan-pariwisata.html, tanggal 15 September 2016, 22.52 WIB

Lingkungan hidup bumi kita, [www.lingkunganhidup.co/pencemaran-](http://www.lingkunganhidup.co/pencemaran-)

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan bapak Jamari selaku kepala paguyuban perikanan pada tanggal 27 November 2016

[laut-di-indonesia-dan-dampaknya/](#), 9  
oktober 2016, 20.05 WIB

Penyebab pencemaran laut,  
<https://www.wedaran.com/19575/penyebab-pencemaran-laut/> , 9 Oktober 2016,  
20.23 WIB.

<sup>1</sup> Data dari kunjungan ke Kecamatan  
Juwana, tanggal 9 Maret 2017, pukul  
11.00 WIB

<http://dkp.jatengprov.go.id/home/a/pp>

[p-bajomulyo](#), diakses 5 februari 2017,  
Pukul 10.00 WIB

Syaifudin, pengantar kapal perikanan,  
<http://syiaifudin.com/pengantar-kapal-perikanan/> , diakses 29 November 2016,  
13.07 WIB

Koesnadi hardjasoemantri, 2001, *Hukum  
Dan Lingkungan Hidup Di Indonesia*,  
cetakan 1, penerbit Program Pasca  
Sarjana Fakultas Hukum Universitas  
Indonesia, jakarta, hlm 258.